BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

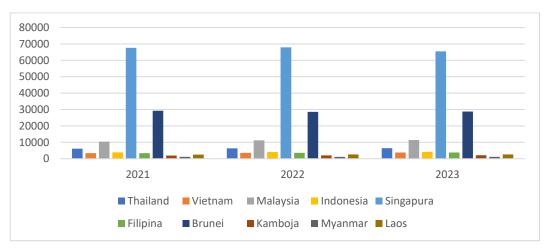
Globalisasi telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang ekonomi. Proses globalisasi yang berlangsung sejak akhir abad ke-20 telah menciptakan suatu sistem perekonomian global yang lebih terbuka dan saling terhubung antarnegara. Keterbukaan ekonomi ini memungkinkan aliran barang, jasa, investasi, dan teknologi untuk melintasi batas-batas negara dengan lebih bebas. Globalisasi mengarah pada peningkatan interaksi antarnegara dalam berbagai sektor ekonomi, yang mengubah struktur perekonomian tradisional menjadi lebih dinamis dan kompetitif. Dalam hal ini, negara-negara di ASEAN, yang umumnya memiliki ekonomi yang sedang berkembang, sangat terpengaruh oleh dinamika globalisasi tersebut. Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, seperti investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, net ekspor, dan persepsi terhadap korupsi, menjadi semakin penting untuk mengukur sejauh mana negaranegara ini dapat memanfaatkan globalisasi guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat mereka (Purba, 2023).

Seiring dengan itu, Teori Modern memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami dinamika ekonomi negara-negara ASEAN. Dalam teori ini, pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Paul Romer dalam karya-karyanya, terutama dalam "Endogenous Technological Change" (Romer, 2019)

menekankan bahwa PDB per kapita tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti FDI, tetapi juga oleh faktor internal, termasuk investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Romer berargumen bahwa negara yang mampu mengembangkan kapasitas internal mereka akan mengalami pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, Teori Institusional yang dikemukakan oleh Li & Abiad (2021) dalam "Institutions, Institutional Change and Economic Performance", menggarisbawahi bahwa kualitas institusi di suatu negara, seperti transparansi, tata kelola pemerintahan, dan penegakan hukum, memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung efisiensi ekonomi. Kelembagaan yang kuat dapat memfasilitasi aliran FDI yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam hal ini PDB per kapita. Oleh karena itu, untuk memahami pengaruh FDI, pengeluaran pemerintah, dan indeks persepsi korupsi terhadap ekonomi ASEAN, pendekatan ini sangat relevan karena menggabungkan faktor-faktor internal dan eksternal yang berinteraksi dalam menentukan hasil ekonomi suatu negara. Dengan demikian, pemahaman tentang net ekspor dan FDI menjadi kunci dalam menganalisis dampaknya terhadap PDB per kapita negara-negara ASEAN, terutama dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul akibat globalisasi.

PDB per kapita merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara. Salah satu faktor yang mempengaruhi PDB per kapita adalah investasi asing langsung (FDI), yang dapat mempercepat pendapatan masyarakat dengan membawa modal, teknologi, dan peningkatan keterampilan (Sethi et al., 2022). Selain itu, pengeluaran pemerintah juga

memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor lain yang dapat meningkatkan produktivitas (Jeong et al., 2020). Net ekspor yang sehat, yaitu dengan tingkat ekspor yang tinggi dibandingkan impor, juga berkontribusi pada PDB per kapita dan PDB per kapita yang lebih tinggi (Kennedy et al., 2001). Di sisi lain, indeks persepsi korupsi dapat memengaruhi daya tarik FDI dan efektifitas pengeluaran pemerintah, karena tingkat korupsi yang tinggi sering kali menghalangi optimalisasi kebijakan ekonomi dan aliran investasi (Ganeriwalla & Mehta, 2021). Dengan demikian, keempat faktor ini FDI, pengeluaran pemerintah, net ekspor, dan indeks persepsi korupsi merupakan elemen penting yang saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap perubahan PDB per kapita di negara-negara ASEAN.



Sumber: WordBank

Gambar 1. 1 PDB per kapita 10 Negara Asean (USD)

Data PDB per kapita negara-negara ASEAN dari 2021 hingga 2023 menunjukkan tren pendapatan masyarakat secara individu di setiap negara berbedabeda, mencerminkan tingkat resiliensi masing-masing negara terhadap tantangan

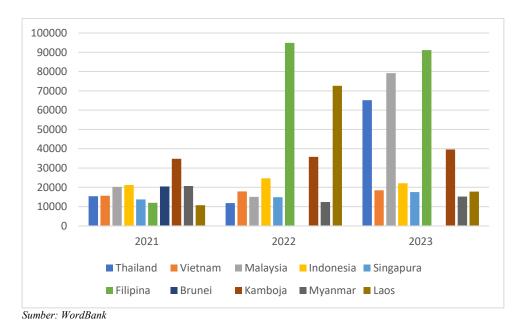
global, termasuk pandemi COVID-19. Dampak pandemi pada 2020 terlihat signifikan, dengan perlambatan pertumbuhan di sebagian besar negara, namun pemulihan mulai terlihat pada tahun-tahun berikutnya. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam mencatatkan pertumbuhan yang konsisten, dengan Singapura tetap unggul sebagai negara dengan PDB per kapita tertinggi, mencapai 67.948,89 Miliar USD pada 2022. Hal ini menunjukkan keberhasilan negara-negara tersebut dalam mempertahankan daya saing ekonomi melalui inovasi dan diversifikasi sektor. Di sisi lain, beberapa negara seperti Myanmar menunjukkan fluktuasi signifikan, yang mengindikasikan tantangan struktural dalam stabilitas ekonomi dan politik. Indonesia dan Filipina menunjukkan peningkatan moderat, mencerminkan pertumbuhan yang lebih inklusif namun masih menghadapi kendala dalam akselerasi pembangunan. Sementara itu, Vietnam mengalami pertumbuhan pesat, melampaui banyak negara dengan reformasi ekonomi yang agresif.

Indonesia memiliki populasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Singapura. Dengan jumlah penduduk sekitar 278,6 juta jiwa, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia. Di sisi lain, Singapura hanya memiliki sekitar 5,9 juta penduduk. PDB per kapita diperoleh dengan membagi total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dengan jumlah penduduknya.

Oleh karena itu, dengan PDB yang sama atau bahkan lebih besar, PDB per kapita Indonesia menjadi lebih kecil karena dibagi dengan jumlah penduduk yang lebih besar(Burhan, 2020). Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa

keberhasilan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan di ASEAN sangat dipengaruhi oleh stabilitas domestik, kebijakan ekonomi, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan global.

Beberapa studi menunjukkan bahwa FDI berkontribusi positif terhadap PDB per kapita di negara-negara ASEAN. Misalnya, penelitian oleh Helmiyanti & Khoirudin (2023) menunjukkan bahwa investasi asing langsung berpengaruh positif terhadap PDB per kapita di delapan negara ASEAN selama periode 2008-2021. Hal ini sejalan dengan temuan Sidiq & Rizqi (2023) yang menunjukkan bahwa investasi asing langsung dan tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap PDB di lima negara ASEAN.



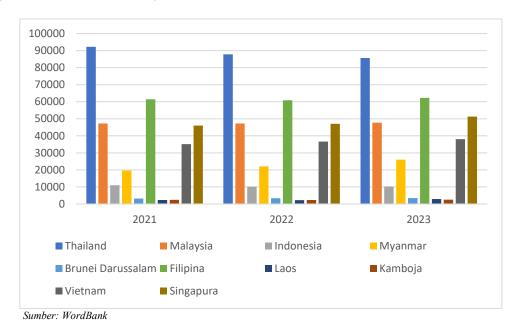
Gambar 1. 2 Investasi Asing Langsung di negara ASEAN (USD)

Data investasi asing langsung di negara-negara ASEAN dari tahun 2021 hingga 2023 mengungkapkan variasi dalam daya tarik kawasan terhadap arus modal global, dengan beberapa negara menunjukkan pertumbuhan signifikan dan

yang lainnya mengalami fluktuasi. Filipina memimpin dalam menarik investasi asing, mencapai USD 911,62 miliar pada 2023, mencerminkan posisinya sebagai pusat keuangan regional dengan kebijakan ramah investor. Di sisi lain, Vietnam menunjukkan peningkatan stabil dari USD 15,66 miliar pada 2021 menjadi USD 18,55 miliar pada 2023, mencerminkan keberhasilannya dalam memanfaatkan reformasi ekonomi dan meningkatkan daya tarik manufaktur. Thailand juga mengalami kenaikan signifikan, mencapai USD 65,16 miliar pada 2023, menunjukkan pemulihan yang kuat pasca-pandemi. Sementara itu, negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Malaysia mencatat tren pertumbuhan moderat, masing-masing dengan nilai investasi asing pada 2023 sebesar USD 20,85 miliar, USD 9,11 miliar, dan USD 7,91 miliar. Namun, beberapa negara seperti Myanmar mencatat angka yang stagnan atau menurun, menunjukkan tantangan dalam menciptakan stabilitas politik dan iklim investasi yang menarik.

Rendahnya arus masuk investasi asing langsung di Indonesia disebabkan oleh lingkungan bisnis yang buruk, lembaga pemerintah yang tidak efisien, tingkat pendidikan yang rendah, dan infrastruktur yang buruk(Sethi et al., 2022). Data ini menyoroti bahwa keberhasilan menarik investasi asing sangat dipengaruhi oleh kebijakan domestik, stabilitas politik, dan daya saing sektor ekonomi, dengan negara-negara yang memiliki strategi diversifikasi dan reformasi yang agresif cenderung unggul dalam menarik arus modal internasional.

Pengeluaran pemerintah juga menjadi faktor yang signifikan dalam PDB per kapita. Penelitian oleh Purnama menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB per kapita di ASEAN-5, meskipun ada indikasi bahwa pengeluaran pemerintah dapat berkontribusi pada PDB per kapita dalam konteks tertentu (Purnama, 2022). Christianingrum menyoroti bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap investasi asing langsung, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi PDB per kapita (Pratiwi, 2021). Selain itu, penelitian oleh Ichvani dan Sasana menemukan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap PDB per kapita di lima negara ASEAN (Ichvani & Sasana, 2019).



Gambar 1.3 Pengeluaran Pemerintah di negara ASEAN (USD)

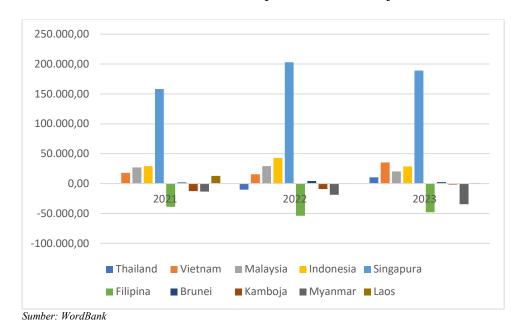
Data pengeluaran pemerintah di negara-negara ASEAN dari 2021 hingga 2023 menunjukkan pola peningkatan yang berbeda-beda, mencerminkan prioritas kebijakan fiskal setiap negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global, termasuk dampak pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, negara-negara dengan perekonomian besar seperti Indonesia dan Thailand menunjukkan tingkat pengeluaran yang tinggi, masing-masing mencapai USD 102,09 miliar dan USD 85,71 miliar pada 2023. Hal ini mencerminkan fokus mereka pada pembiayaan

infrastruktur dan stimulus ekonomi untuk mendorong pemulihan pasca-pandemi. Singapura juga mencatat peningkatan signifikan, dengan pengeluaran mencapai USD 51,27 miliar pada 2023, menandakan komitmen terhadap investasi dalam layanan publik dan inovasi. Negara seperti Vietnam, yang pengeluarannya naik menjadi USD 38,08 miliar pada 2023, menunjukkan strategi fiskal yang agresif untuk menopang PDB per kapita. Di sisi lain, negara-negara dengan kapasitas fiskal lebih kecil, seperti Myanmar, tetap memiliki tingkat pengeluaran yang relatif rendah, masing-masing sebesar USD 2,65 miliar pada 2023, mencerminkan keterbatasan dalam alokasi sumber daya.

Pengeluaran, pemerintah Thailand lebih besar dibandingkan dengan Indonesia pada periode 2021 hingga 2023. Meskipun Indonesia memiliki anggaran yang terus meningkat, terutama untuk pemulihan ekonomi dan penanggulangan pandemi, pengeluaran pemerintah Thailand lebih tinggi dalam hal efisiensi dan alokasi untuk pembangunan sektor-sektor strategis. Perbedaan ini mencerminkan karakteristik ekonomi, demografi, dan kebijakan fiskal masing-masing negara. Indonesia lebih fokus pada alokasi yang lebih luas untuk berbagai sektor dengan mempertimbangkan tantangan geografi dan populasi yang besar, sementara Thailand lebih terfokus pada efisiensi anggaran dan pemulihan sektor-sektor yang lebih terstruktur(Ramesh, 2019). Berdasarkan data ini, terlihat bahwa keberhasilan pengelolaan fiskal di negara-negara ASEAN sangat bergantung pada kemampuan negara-negara untuk mengalokasikan pengeluaran secara efektif guna mendorong PDB per kapita sekaligus mengatasi tantangan domestik dan global.

Net ekspor, yang mencerminkan selisih antara ekspor dan impor, juga

berperan dalam PDB per kapita. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan net ekspor yang positif cenderung mengalami PDB per kapita yang lebih baik. Namun, data spesifik mengenai pengaruh net ekspor terhadap PDB per kapita di ASEAN masih terbatas dan memerlukan penelitian lebih lanjut.



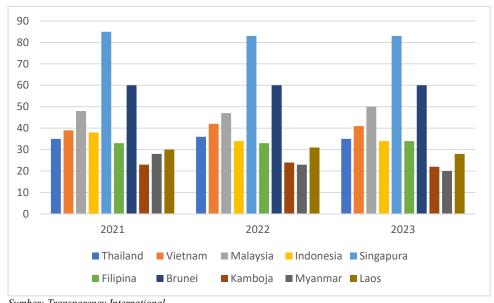
Gambar 1. 4 Net ekspor di negara ASEAN (USD)

Data net ekspor negara-negara ASEAN dari 2021 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang beragam, mencerminkan kemampuan masing-masing negara dalam mempertahankan keseimbangan ekspor dan impor di tengah fluktuasi ekonomi global. Secara umum, negara-negara dengan sektor perdagangan yang kuat, seperti Vietnam, Singapura, dan Malaysia, mencatatkan angka net ekspor yang tinggi. Vietnam, misalnya, mengalami kenaikan signifikan dari USD 154,83 miliar pada 2021 menjadi USD 158,14 miliar pada 2023, menandakan daya saing ekspor yang terus meningkat. Singapura stabil pada angka tinggi, mencapai USD 170,42 miliar pada 2023, didukung oleh posisinya sebagai pusat perdagangan internasional. Malaysia juga mencatatkan kinerja yang kuat dengan nilai net ekspor sebesar USD

144,75 miliar pada 2023. Di sisi lain, Indonesia menunjukkan tren peningkatan moderat, dari USD 30,28 miliar pada 2019 menjadi USD 36,06 miliar pada 2023, mencerminkan pertumbuhan sektor ekspor yang lebih lambat. Beberapa negara, seperti Myanmar, mencatat angka yang lebih kecil, masing-masing hanya mencapai USD 46,97 miliar, menandakan tantangan struktural dalam meningkatkan kapasitas perdagangan. Singapura memiliki ekonomi yang sangat terbuka dan berbasis perdagangan internasional, dengan fokus pada sektor jasa, teknologi tinggi, dan reekspor. Sebagai salah satu pusat logistik dan keuangan global, Singapura memanfaatkan lokasi strategisnya di jalur pelayaran internasional untuk menjadi hub perdagangan, Sementara itu, Indonesia lebih bergantung pada ekspor komoditas primer seperti minyak sawit, batubara, dan gas alam, yang harganya fluktuatif dan rentan terhadap gejolak pasar global (Rusydi et al., 2023). Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa keberhasilan net ekspor ASEAN sangat bergantung pada diversifikasi sektor ekspor, kestabilan politik, dan strategi integrasi ke pasar global, dengan negara-negara yang memiliki infrastruktur perdagangan yang kuat lebih mampu memanfaatkan peluang ekonomi internasional.

Indeks persepsi korupsi (IPK) merupakan faktor penting lainnya yang mempengaruhi PDB per kapita. Penelitian oleh Purnama menunjukkan bahwa IPK berpengaruh negatif terhadap investasi asing langsung, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi PDB per kapita (Purnama, 2022). Selain itu, penelitian oleh Haldi menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap PDB per kapita per kapita (Haldi et al., 2023). Temuan ini didukung oleh penelitian

oleh Hazmi yang menyoroti bahwa korupsi dapat menghambat PDB per kapita di Indonesia (Alif, 2024). Sebaliknya, Ichvani & Sasana (2019) menemukan bahwa IPK berpengaruh positif terhadap PDB per kapita di lima negara ASEAN, menunjukkan bahwa persepsi korupsi yang lebih baik dapat mendorong PDB per kapita.



Sumber: Transparency International

Gambar 1. 5 Indeks Persepsi Korupsi di negara ASEAN (Poin)

Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) negara-negara ASEAN dari 2021 hingga 2023 menunjukkan pola yang relatif stabil, namun dengan perbedaan mencolok antara negara-negara di ASEAN. Singapura konsisten menjadi negara dengan skor IPK tertinggi, stabil di angka 85 selama lima tahun, menunjukkan tingkat transparansi dan tata kelola yang sangat baik. Sebaliknya, negara-negara seperti Kamboja dan Myanmar berada di posisi terendah dengan skor masingmasing hanya 21 dan 28 pada 2023, mengindikasikan tantangan serius dalam memberantas korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan. Malaysia dan Indonesia menunjukkan tren menurun dari 48 dan 38 pada 2021 menjadi 50 dan 34

pada 2023, mencerminkan adanya kendala dalam mempertahankan reformasi antikorupsi. Negara seperti Brunei Darussalam tetap stabil di skor tinggi 60, mengindikasikan tata kelola yang relatif baik di kawasan tersebut. Meski Vietnam mengalami peningkatan skor dari 39 pada 2021 menjadi 41 pada 2023

Singapura dikenal memiliki sistem hukum yang ketat dan konsisten dalam menindak korupsi. Lembaga seperti *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) bekerja secara efektif dan independen. Sementara di Indonesia, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menunjukkan kinerja yang baik, tantangan seperti intervensi politik dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan (Pakpahan et al., 2022). Data ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penguatan tata kelola dan pemberantasan korupsi di ASEAN sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menjalankan reformasi sistemik serta menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan beberapa permasalahan dalam latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti suatu penelitian dengan judul "Pengaruh Investasi asing langsung, Pengeluaran Pemerintah, Net ekspor Dan Indeks Persepsi Korupsi Terhadap PDB per kapita Asean (Studi Kasus 10 Negara-Negara ASEAN)".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh secara parsial investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, net ekspor, dan indeks persepsi korupsi terhadap PDB per kapita

di 10 negara ASEAN?

 Bagaimana pengaruh secara bersama-sama investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, net ekspor, dan indeks persepsi korupsi secara bersama-sama terhadap PDB per kapita di 10 negara ASEAN

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengaruh secara parsial investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, net ekspor, dan indeks persepsi korupsi terhadap PDB per kapita di 10 negara ASEAN.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, net ekspor, dan indeks persepsi korupsi secara bersama-sama terhadap PDB per kapita di 10 negara ASEAN.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, terdapat beberapa kegunaan yang dapat diidentifikasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah uraian mengenai kegunaan penelitian ini:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu di bidang ekonomi dan kebijakan publik. Melalui analisis pengaruh faktor-faktor seperti investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, net ekspor, dan indeks persepsi korupsi terhadap PDB per kapita. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman

tentang dinamika ekonomi di negara ASEAN.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan acuan dalam merancang kebijakan serta strategi peningkatan PDB per kapita di Kawasan ASEAN.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di 10 negara ASEAN melalui website resmi World Bank dan sumber data statistik resmi dari masing-masing negara.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini akan dilaksanakan terhitung dari bulan Oktober 2024 sampai dengan Mei 2025. Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2024											Tahun 2025																				
	Oktober					November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan outline dan rekomendasi pembimbing Konsultasi awal dan																																
menyusun rencana kegiatan																																
Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal																																
Seminar proposal skripsi																																
Revisi Proposal Skripsi dan persetujuan revisi																																
Pengumpulan dan pengolahan data																																
Proses bimbingan untuk menyelesaikan skripsi																																
Ujian skripsi, revisi skripsi, dan pengesahan skripsi																																